



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(L P P D)**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Memenuhi amanat UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan penyusunan LPPD tahun 2017 yang dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan Kebijakan, yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kinerja tingkat pelaksana Kebijakan Daerah yaitu yang dilaksanakan oleh tiap-tiap SKPD yang ada di daerah serta Tingkat Capaian Kinerja urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Demikian, semoga LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan hasil evaluasi selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dimasa yang akan datang.

Pangkalan Bun, Maret 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum Pembentukan Daerah	1
B. Gambaran Umum Daerah	1
1. Kondisi Geografis Daerah	1
2. Gambaran Umum Demografis	4
3. Kondisi Ekonomi	7
a. Potensi dan Komoditas Unggulan Daerah	7
b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB	15
BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	17
1. Visi dan Misi	17
2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	23
3. Prioritas Daerah	30
BAB III. URUSAN DESENTRALISASI	38
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi	38
1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib & Pilihan	38
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	48
B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan	51
a. Pendidikan	51
b. Kesehatan	61
c. Lingkungan Hidup	93
d. Pekerjaan Umum	108
e. Penataan Ruang	118
f. Perencanaan Pembangunan.....	120
g. Perumahan.....	129
h. Kepemudaan & Olahraga	132
i. Penanaman Modal.....	134
j. Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah	139
k. Kependudukan & Catatan Sipil	156
l. Ketenagakerjaan.....	167
m. Ketahanan Pangan	180
n. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.....	183
o. Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera.....	194
p. Perhubungan.....	196
q. Komunikasi & Informatika	212
r. Pertanahan	214
s. Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	215
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.....	225
u. Pemberdayaan Masyarakat & Desa.....	299

v. Sosial	307
w. Kebudayaan	328
x. Statistik	333
y. Kearsipan	333
z. Perpustakaan	335
C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan	351
a. Kelautan dan Perikanan	351
b. Pertanian	356
c. Kehutanan	378
d. Energi & Sumber Daya Mineral.....	385
e. Pariwisata.....	389
f. Industri	401
g. Perdagangan	406
h. Ketrasmigrasian.....	409
D. Indikator Kinerja Kunci	412
1. Tataran Pengambil Kebijakan (IKK III.1)	412
2. Tataran Pelaksana Kebijakan (IKK III.2).....	426
3. Tataran Pelaksana Kebijakan (IKK III.3)	646
BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN	661
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	661
A.1 Bidang Kesehatan	661
A.2 Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	663
A.3 Bidang Kelautan & Perikanan	667
A.4 Bidang Perkebunan	675
B. Dana Urusan Bersama yang Diterima	676
BAB V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	677
A. Kerjasama Antar Daerah	677
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	677
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	688
D. Pembinaan Batas Wilayah	689
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	691
F. Pengelolaan Kawasan Khusus	695
G. Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban	695
BAB VI. PENUTUP	697